



PENGUATAN KAPASITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI

Raisa Viranti¹⁾, Bunga Aprillia²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Penguatan Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi”. Fenomena masalah menunjukkan kapasitas BPBD dan sistem penanggulangan bencana yang ada masih lemah, terutama dalam kesiapsiagaan, koordinasi respons, distribusi bantuan, sistem peringatan dini yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Rumusan masalah adalah Bagaimana Penguatan Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas BPBD Kabupaten Sukabumi dalam penanggulangan bencana. Teori yang digunakan adalah teori penguatan kapasitas kelembagaan Grindle (1997:28) dengan dimensi penguatan potensi sumber daya manusia; penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan potensi sumber daya manusia belum memadai dan distribusi SDM yang tidak merata, penguatan organisasi belum optimal ditemukan keterbatasan sarana-prasarana, peralatan evakuasi, dan logistik kebencanaan, serta reformasi kelembagaan belum konsisten masih memerlukan dukungan anggaran, peningkatan regulasi teknis, dan pengawasan.

Kata Kunci: Penguatan kapasitas, kesiapsiagaan, banjir, potensi sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.

Abstract

This study is titled ‘Strengthening the Capacity of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Flood Disaster Preparedness in Kalibunder Subdistrict, Sukabumi Regency.’ The problem phenomenon indicates that the capacity of the BPBD and the existing disaster management system is still weak, particularly in terms of preparedness, response coordination, aid distribution, an early warning system that is not yet optimal, and insufficient community participation. The research question is: How can the capacity of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) be strengthened in flood disaster preparedness in Kalibunder Sub-district, Sukabumi Regency? This study aims to analyse the strengthening of the BPBD’s capacity in

disaster management in Sukabumi Regency. The theory used is Grindle's (1997:28) institutional capacity-building theory with dimensions of Development of the human resource, Strengthening organization and Reformation of institution. The research method is descriptive qualitative. Data collection techniques were conducted through documentation, observation, and interviews. Data analysis used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that Development of the human resource is insufficient and human resource distribution is uneven, Strengthening organization is not optimal due to limitations in infrastructure, evacuation equipment, and disaster logistics, and Reformation of institution is inconsistent and still requires budgetary support, improved technical regulations, and oversight.

Keywords: *capacity building, preparedness, flooding, development of the human resource, strengthening organization and reformation of institution.*

PENDAHULUAN

Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini terjadi akibat luapan air dari saluran, sungai, atau danau yang disebabkan oleh hujan deras, pengelolaan air yang buruk, atau perubahan iklim, dan menjadi salah satu bencana hidrometeorologi yang merugikan secara materiil, menimbulkan kerusakan infrastruktur dan bahkan fatalitas. Penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif meliputi aspek ekologis, teknologis, sosial, dan kelembagaan agar dampak banjir dapat dikurangi secara efektif dan berkelanjutan (Aprilia 2025).

Kabupaten Sukabumi, dengan luas wilayah sekitar 4.145,7 km², menjadi salah satu kabupaten terluas di Pulau Jawa dan mengalami banjir hebat pada akhir tahun 2024 akibat curah hujan ekstrem hingga meluapnya Sungai Cikaso (Dwi 2024). Kecamatan Kalibunder, yang terletak di bagian selatan Kabupaten Sukabumi, merupakan wilayah yang rentan terhadap banjir dengan kondisi geografis dataran rendah dan lereng bukit serta keberadaan sungai yang sering meluap, sehingga berdampak besar terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat di sekitarnya (Ani 2024).

Peristiwa banjir tahun 2018 dan 2024 di Kecamatan Kalibunder menggambarkan kerentanan wilayah tersebut, dengan dampak signifikan pada kerusakan rumah, infrastruktur, dan isolasi ribuan warga akibat putusnya akses dan aliran Listrik (Hasbi 2018). Distribusi bantuan yang lambat dan tidak merata memperlihatkan lemahnya sistem koordinasi dan respons cepat dalam penanganan bencana di daerah ini. Selain itu,

keterbatasan sistem peringatan dini serta data resmi yang tidak akurat mengindikasikan kelemahan dalam sistem pelaporan, deteksi, dan kesiapsiagaan bencana (Redaksi 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul **"PENGUATAN KAPASITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI"**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penguatan Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas BPBD dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kecamatan Kalibunder dengan fokus pada pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur mitigasi banjir, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan bencana.

Kerangka hukum yang mengatur penanggulangan bencana dari tingkat nasional hingga daerah sudah diterapkan, termasuk pembentukan BPBD sebagai lembaga teknis pelaksana di daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi tantangan koordinasi yang kurang optimal dan keterbatasan sumber daya, sehingga sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat. Upaya ini penting agar regulasi dapat diimplementasikan dengan baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sistem komando dan kendali yang efektif, serta pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi banjir secara terpadu dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kesiapsiagaan Bencana Banjir di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi. Unit analisis dan informan adalah BPBD Kabupaten Sukabumi,

Kecamatan Kalibunder serta masyarakat yang terkena dampak bencana. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi) Analisis data dilakukan secara sistematis melalui *Data Collection*, *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Verification*.

PEMBAHASAN

Keterbatasan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi banjir di Kecamatan Kalibunder menjadi tantangan besar. BPBD memiliki tanggung jawab penting dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana, namun saat ini belum mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak secara optimal, terutama daerah-daerah yang memiliki akses jalan dan komunikasi yang sulit dijangkau. Ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, teknologi peringatan dini, serta partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.

Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur penanggulangan bencana, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010. Namun, tanpa pelaksanaan yang konsisten dan dukungan sumber daya yang memadai, peraturan tersebut sulit memberikan dampak maksimal di lapangan.

Melalui pendekatan terpadu yang melibatkan aspek ekologis, sosial, teknologi, dan kelembagaan, penanganan banjir di Kecamatan Kalibunder dapat lebih efektif. Pengembangan sistem peringatan dini yang canggih, peningkatan kapasitas BPBD, perbaikan infrastruktur drainase, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko dan dampak banjir.

Secara keseluruhan, fenomena banjir di Kecamatan Kalibunder merupakan manifestasi dari tantangan lingkungan, kelembagaan, dan sosial-ekonomi yang kompleks. Penanggulangannya membutuhkan komitmen serius dari

seluruh pihak terkait agar wilayah ini dapat menjadi lebih siap dan tangguh menghadapi ancaman banjir di masa mendatang.

Penguatan Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi sumber daya manusia, BPBD Kabupaten Sukabumi telah memiliki rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat di kalangan internal. Petugas menunjukkan motivasi karena dorongan kemanusiaan. Namun, rasa memiliki belum merata di masyarakat. Sebagian warga menganggap penanggulangan bencana tanggung jawab pemerintah, sehingga keterlibatan masih minim. Meski ada P2BK dan DESTANA, pelatihan belum berkelanjutan. Sistem peringatan dini belum tersedia untuk banjir dan longsor, padahal itu bencana yang paling sering terjadi. Sementara sistem tsunami dan gempa sudah ada. Pemahaman masyarakat masih rendah, dan media tradisional seperti pengumuman masjid masih diandalkan. Hal ini menunjukkan penguatan SDM belum merata dan terkendala oleh pelatihan serta edukasi.

Penguatan Organisasi

Dari dimensi organisasi, BPBD Kabupaten Sukabumi memiliki struktur dan program yang lengkap, tetapi implementasinya belum optimal. Sosialisasi bersifat sporadis, hanya saat momen tertentu. Fasilitas seperti posko, jalur evakuasi, dan sarana darurat terbatas; sebagian desa tidak memilikinya. Distribusi bantuan sering terlambat, warga menunggu berhari-hari. Kepercayaan masyarakat pun menurun. Infrastruktur komunikasi belum mendukung respon cepat; saat bencana, listrik dan jaringan terganggu, pelaporan dan keputusan pun lambat. Ini memperlihatkan penguatan organisasi belum efektif, terutama dalam operasional dan komunikasi darurat.

Reformasi Kelembagaan

Pada dimensi reformasi kelembagaan, BPBD belum memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur darurat. Peran BPBD masih sebagai koordinator, sehingga respon lamban karena proses birokrasi panjang. Sistem komando dan kendali telah

dibentuk, namun implementasinya terkendala teknis dan logistik. Partisipasi masyarakat juga rendah karena belum dilibatkan secara aktif. Beberapa warga menolak relokasi meski tinggal di zona banjir karena mempertahankan usaha. Ini menunjukkan reformasi kelembagaan perlu didorong melalui pelibatan masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan desentralisasi kewenangan agar respon lebih cepat dan tepat.

KESIMPULAN

Keterbatasan kapasitas BPBD Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi banjir di Kecamatan Kalibunder disebabkan oleh kendala sumber daya manusia yang belum merata, implementasi organisasi yang belum optimal, serta kelembagaan yang masih terbatas dalam kewenangan dan koordinasi. Kondisi ini menghambat efektivitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana, terutama di wilayah sulit dijangkau dan dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, penanggulangan banjir memerlukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, perbaikan infrastruktur dan sistem komunikasi darurat, peningkatan peran serta masyarakat, serta reformasi kelembagaan dengan desentralisasi kewenangan dan koordinasi lintas sektor, agar penanganan banjir dapat lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga mengembangkan teknologi peringatan dini yang lebih canggih dan memanfaatkan pendekatan terpadu yang melibatkan aspek ekologis dan sosial untuk meningkatkan ketahanan komunitas terhadap bencana di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ani, Ahmad Yeyen Fidyani; 2024. "Keadaan Geografis." In *Kecamatan Kalibunder Dalam Angka 2024*, , 3.

Aprilia, Bunga. 2025. *Manajemen Bencana Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Deepublish.

INTERNET

Dwi, Cahwati. 2024. "Banjir Bandang Terjang Sukabumi, Sejumlah Rumah Terendam." *Universitas Muhammadiyah Jakarta*.

https://umj.ac.id/just_info/banjir-bandang-terjang-sukabumi-sejumlah-rumah-terendam/.

Hasbi. 2018. "Kapolsek Kalibunder Bersama Jajaranya Tinjau Sejumlah Titik Banjir." *Swara Jabbar*.

<https://swarajabbarnews.com/2018/03/25/kapolsek-kalibunder-bersama-jajaranya-tinjau-sejumlah-titik-banjir/>.

Redaksi. 2025. "BPBD Kabupaten Sukabumi Perkuat Strategi Mitigasi Bencana Dalam Musrebang RPJMD 2025-2029 Bupati." *Arahbicara.com*.